

Oh... PKS

Bayu Dardias  
Dosen JPP Fisipol UGM  
Mahasiswa Politik the Australian National University

Berita mengejutkan itu datang ketika Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Citra PKS yang selama ini dikenal (atau diisukan) bersih dari segala macam praktek kotor korupsi langsung guncang.

LHI ditetapkan menjadi tersangka ketika suruhannya, AF tertangkap tangan menerima suap dan berdua di kamar hotel bersama seorang perempuan muda.

Sejak didirikan, tidak ada satupun anggota PK atau PKS yang menjadi tersangka apalagi terpidana kasus korupsi. Kader PKS yang cukup menghiasi layar berita adalah Misbakhun dengan kasus LC fiktif dan Arifinto yang membuka gambar porno di DPR. Misbakhun belakangan dibebaskan dan namanya direhabilitasi sedangkan Arifinto, yang juga pendiri PK, mengundurkan diri dari DPR.

Berbeda dengan dua kasus di atas, kali ini pukulan telak diterima PKS. Dengan tingkat kesuksesan perkara yang nyaris 100%, seluruh tersangka KPK akan menjalani proses hukum untuk akhirnya menghuni hotel prodeo. Belum pernah ada tersangka yang terkait dengan kasus tertangkap tangan KPK, dapat bebas dari jeratan kasus hukum.

Seluruh proses mengejutkan PKS ini terjadi diantara tiga ketidakberuntungan sekaligus:

Pertama, tersangka korupsi yang ditangkap KPK adalah Presiden PKS, pimpinan tertinggi yang menjalankan seluruh aktifitas eksekutif partai. Posisi Luthfi di PKS sejajar dengan Anas Urbaningrum di Demokrat, Megawati di PDIP atau Aburizal Bakrie di Golkar. Lebih dari itu, Luthfi juga salah satu pendiri PK.

Pada posisi sebagai Presiden PKS, sosok Luthfi tak bisa dibedakan sebagai individu dan institusi. Dengan laporan kekayaan yang hanya 1 Miliar di tahun 2009 lalu, muncul banyak dugaan bahwa dan tersebut sejatinya digunakan juga untuk kepentingan partai. Jumlah seluruh kekayaan Luthfi sama dengan jumlah uang yang disita di jok mobil orang suruhannya.

Inilah juga untuk pertama kalinya, seorang pemimpin tertinggi partai menjadi tersangka KPK. Setelah dua bulan lalu publik dikejutkan dengan Andi Malarrangeng, sekarang dikejutkan oleh Presiden PKS.

Kedua, peristiwa ini terjadi di momentum penting menjelang pemilu tahun depan.

Seluruh proses pemeriksaan dan pengadilan sampai akhirnya menjadi vonis, akan menghiasi media nasional. PKS akan menerima limpahan ketidakberuntungan ini. Jika prosesnya singkat dan tak menyeret banyak nama, tentu lebih baik. Apabila terus sampai 2014, itu adalah bencana buruk.

Ketiga, kasus yang menyerpa terkait dengan impor daging sapi yang sensitif terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi titik penting perjuangan PKS. Naiknya harga daging sapi yang diluar nalar, sempat membuat pedagang daging di pasar Beringharjo mogok berjualan. Harga daging sapi yang mahal juga memukul pedagang bakso yang sudah terlanjur menjadi favorit rakyat.

Seluruh nestapa ini semakin memilukan karena partai bersih adalah jualan PKS yang paling menarik hati pemilih. Dengan sedikit pemilih kita tahu, tak ada partai yang bisa bertahan hidup, PKS pernah merasakannya ketika menjadi PK di pemilu 1999.

Partanyannya, seberapa serius kasus LHI akan mempengaruhi kader, simpatisan dan pemilih PKS di 2014?

Bagi kader dan simpatisan PKS, sepertinya kasus ini tidak akan berdampak serius. Kader dan simpatisan PKS merupakan yang cukup solid dan militan. Mereka akan buru-buru melokalisir kasus ini menjadi masalah oknum yang sifatnya personal, mirip dengan yang disampaikan Anis Matta.

Untungnya, PKS bukan partai yang mengandalkan diri pada karisma tokoh yang memegang tampuk presiden atau pemimpin partai. Hal ini kontras dengan partai-partai lainnya. Tiga presiden PKS sebelumnya, Nurmahmudi, Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring tak pernah dikenal luas sebelumnya. Bagi PKS, partailah yang membesarkan pemimpin partai, bukan sebaliknya. Mengganti presiden partai adalah persoalan mudah.

Beberapa bulan lalu, dalam kuliah tamu di JPP Fisipol UGM, Anggota DPR dari Yogyakarta dan pendiri PKS, Agus Purnomo menyampaikan dilema yang saat ini dihadapi internal PKS. PKS dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap konsisten dengan ide awal namun kehilangan pemilih, atau lebih moderat untuk menarik suara lebih banyak. Dilema ini masih terus berlangsung dan kasus ini bisa jadi mempertegas fiksi di internal PKS. Terlebih, saat ini adalah periode penyaringan caleg, siapa yang akan direkrut PKS, faksi keras atau faksi moderat?

Bagi pemilih, hal ini bisa jadi berdampak cukup serius. PKS yang tengah membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut pemilih yang mungkin hengkang dari partai yang tersandung korupsi, mungkin harus berpikir ulang.

Satu-satunya cara untuk mempertahankan citra PKS, sayangnya, adalah dengan membuktikan bahwa kasus korupsi ini murni individual dan bukan sistemik partai. Teori sapi hitam, eh maksudnya kambing hitam akan segera diterapkan. Dengan begitu, nasib PKS akan berbeda dengan Batavia Air yang dinyatakan pailit pada hari yang sama. Apa boleh buat.